

## DAFTAR PUSTAKA

- Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2, diakses pada 16 Maret 2015, <[http://1.bp.blogspot.com/-lz0oznO9P\\_w/UV7PrPE\\_0fI/AAAAAAAAAEo/RTIQ09XkOJY/s1600/sismiop2.jpg](http://1.bp.blogspot.com/-lz0oznO9P_w/UV7PrPE_0fI/AAAAAAAAAEo/RTIQ09XkOJY/s1600/sismiop2.jpg)>
- Definisi Penelitian, diakses pada 20 Februari 2015, <<http://ridwanaz.com/umum/bahasa/pengertian-penelitian-definisi-penelitian-adalah/>>
- DPPKAD Kabupaten Sukoharjo, diakses pada 6 Maret 2015, <[dppkad.sukoharjokab.go.id](http://dppkad.sukoharjokab.go.id)>
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hendry. 2013. *Metode Pengumpulan Data*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B*. Jakarta Pusat : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Metode Pengumpulan Data, diakses pada 20 Februari 2015, <<http://teorionline.wordpress.com/service/metode-pengumpulan-data/>>
- Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo No. 48 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan Standart Operating Procedure Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- Peraturan Bupati Sukuharjo Nomor 60 tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas

Peraturan Daerah ( Perda ) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 tahun 2008 tentang  
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas  
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Sukoharjo.

Sari, Yulia Anggara.2011. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan  
Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah Di Kota  
Bandung*.Universitas PendidikanIndonesia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang  
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah  
dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.